



**PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI
TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Oleh
Yoga Saputra
NIM 150810101051**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI
TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan di
Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

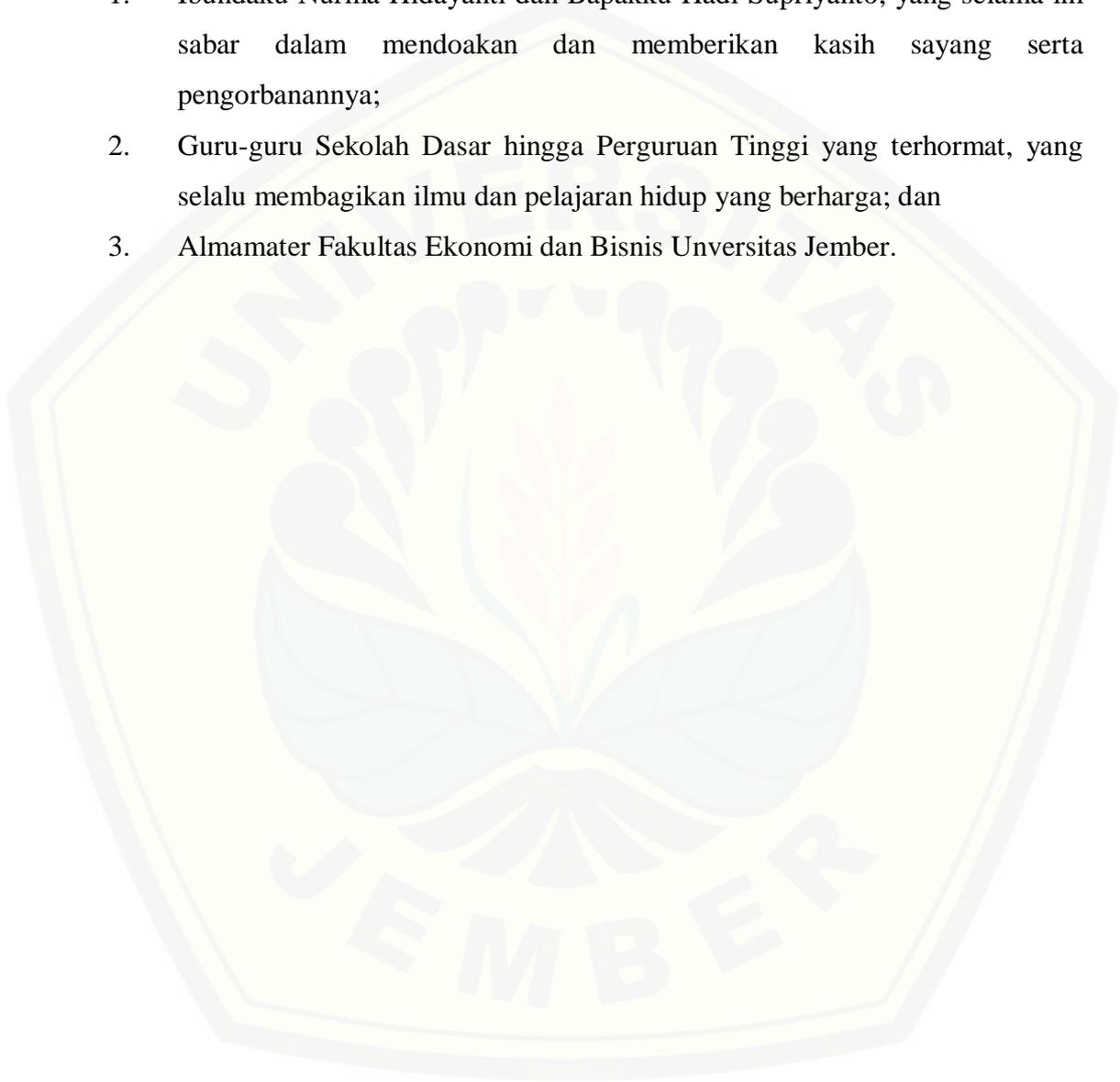
Oleh
Yoga Saputra
NIM 150810101051

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur dan kerendahan hati serta kebahagiaan yang tak ternilai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibundaku Nurma Hidayanti dan Bapakku Hadi Supriyanto, yang selama ini sabar dalam mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanannya;
2. Guru-guru Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang selalu membagikan ilmu dan pelajaran hidup yang berharga; dan
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

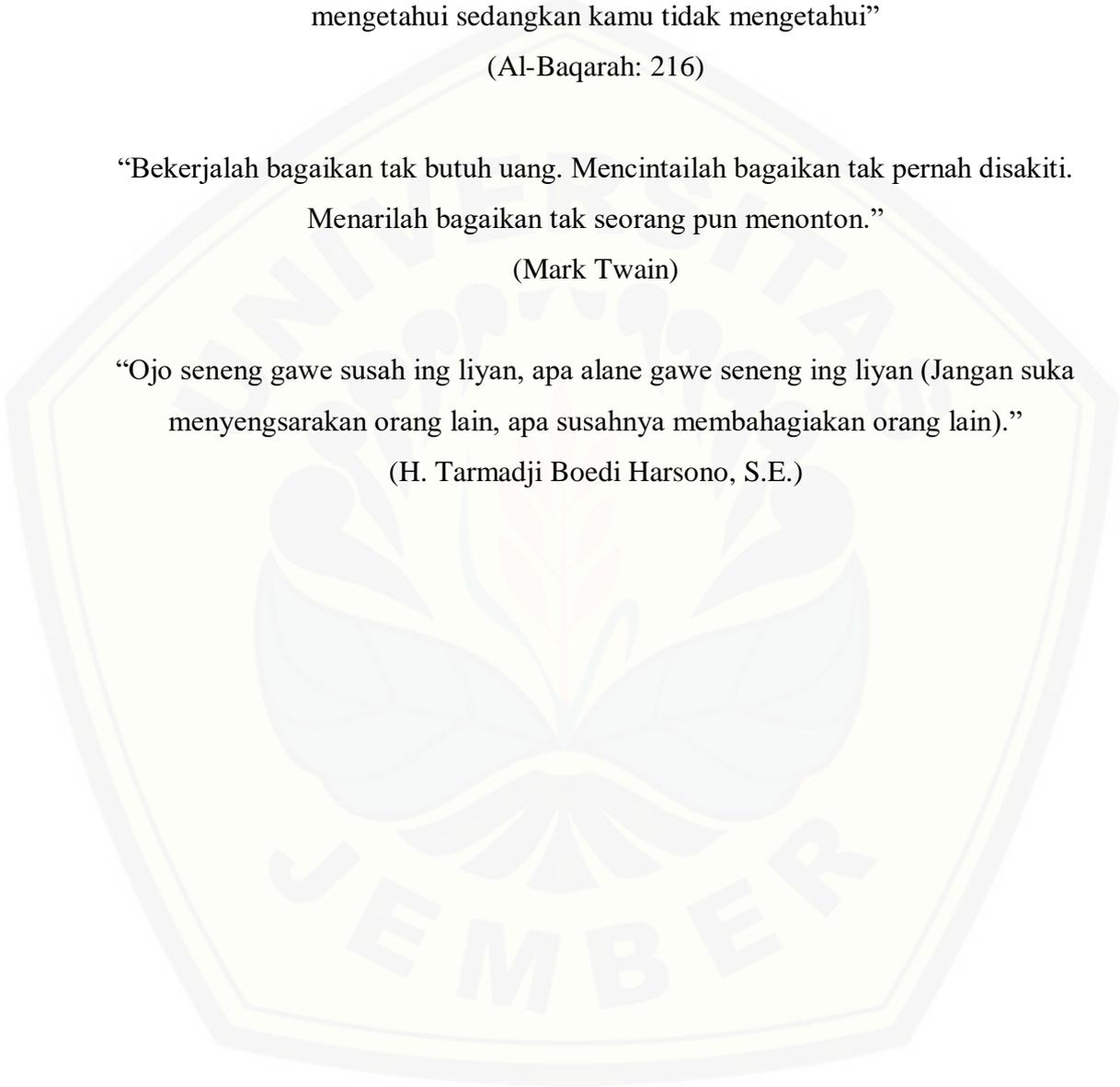
(Al-Baqarah: 216)

“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun menonton.”

(Mark Twain)

“Ojo seneng gawe susah ing liyan, apa alane gawe seneng ing liyan (Jangan suka menyengsarakan orang lain, apa susahnya membahagiakan orang lain).”

(H. Tarmadji Boedi Harsono, S.E.)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Saputra

Nim : 150810101051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”, merupakan benar adanya hasil karya sendiri, terkecuali apabila terdapat kutipan substansi yang disertai sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar adanya.

Jember, 15 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Yoga Saputra
150810101051

SKRIPSI

**PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI
TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh
Yoga Saputra
NIM 150810101051

Pembimbing

Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc.
Dosen Pembimbing 2 : Aisah Jumiati, S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”

Nama : Yoga Saputra

NIM : 150810101051

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 4 Oktober 2019

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc.
NIP. 195608311984031002

Aisah Jumiati, S.E., M.P.
NIP. 196809261994032002

Mengetahui
Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI
TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yoga Saputra

NIM : 150810101051

Jurusan : Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

5 Desember 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. (.....)
NIP. 196306141990021001
2. Sekretaris Dr. Zainuri, M.Si. (.....)
NIP. 196403251989021001
3. Anggota Drs. Agus Luthfi, M.Si. (.....)
NIP. 196505221990021001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

*PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI TERHADAP
TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TAMANSARI
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI*

Yoga Saputra

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para *entrepreneur* dan *innovator*. Pembangunan ekonomi berawal dari suatu lingkungan sosial, teknologi dan politik yang dapat menunjang kreativitas inovator yang dapat dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh setelah adanya BUMDes terhadap perekonomian masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUMDes, pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan UMKM. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode snowball. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BUMDes berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi.

THE INFLUENCE OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES IJEN LESTARI ON
THE VILLAGE COMMUNITY ECONOMY IN TAMANSARI VILLAGE
LICIN DISTRICT BANYUWANGI REGENCY

Yoga Saputra

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and
Business, University of Jember

ABSTRACT

Economic development is an increase in output caused by innovations made by entrepreneurs and innovators. Economic development begins with a social, technological and political environment that can support innovator creativity that can be developed through Village-Owned Enterprises (BUMDes). This type of research is qualitative descriptive that aims to determine the effect after the presence of BUMDes on the economy of the Tamansari Village community, Cluring District, Banyuwangi Regency. The variables used in this study are BUMDes, community empowerment, employment and UMKM. The sampling method used in this study is the snowball method. Based on the results of the study indicate that the BUMDes variable plays a role in improving the economy of rural communities.

Keywords: Village-Owned Enterprises (BUMDes), community empowerment, economic development.

RINGKASAN

Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi; Yoga Saputra; 150810101051; 2019; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

BUMDes adalah suatu badan usah yang sebagian besar bahkan seluruh modalnya dimiliki oleh desa dengan penyertaan secara langsung yang berasal dari alokasi dana pemerintah maupun berasal dari kekayaan asli desa yang dipisahkan untuk mengelola jasa pelayanan, aset, dan usaha lainnya yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat desa (Herry Kamaroesid, 2016:13). Prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting untuk dipahami oleh pelaku BUMDes. Menurut Herry Kamaroesid (2016:20) terdapat 6 prinsip pengelolaan BUMDes yaitu :

- a. *Partisipatif*, seluruh komponen yang berada dalam BUMDes harus bersedia memberikan kontribusi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong keberlangsungan usaha;
- b. *Kooperatif*, seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus menanamkan keinginan kuat untuk bekerja sama yang sedemikian rupa demi kelanggengan usaha yang didirikan;
- c. *Transparan*, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes harus bersifat terbuka kepada seluruh anggota, termasuk dalam hal keuangan;
- d. *Akuntabel*, Semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis;
- e. *Sustainabel*, usaha harus dapat dikembangkan dan dipertahankan oleh anggota dalam wadah BUMDes;
- f. *Emansipatif*, seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi.

BUMDes Ijen Lestari didirikan melalui musyawarah desa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa serta

pihak lain yang bertujuan umum untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Ijen Lestari merupakan inovasi pelayanan publik yang didirikan untuk mendukung pariwisata berbasis masyarakat di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Hal ini karena BUMDes Ijen Lestari merupakan gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh komunitas atau Desa Tamansari.

Dalam perencanaannya BUMDes Ijen Lestari memiliki perencanaan jangka panjang dan berkelanjutan, dimana hal ini dapat dilihat dari program-program serta unit usaha yang ada di BUMDes Ijen Lestari. Dalam pengelolaannya BUMDes Ijen Lestari juga sangat baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi pada BUMDes Ijen Lestari dari tahun pertama pendirian sampai sekarang yang sudah berkembang pesat.

BUMDes Ijen Lestari memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat terutama dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemberdayaan masyarakat ini dirancang dengan adanya pengembangan unit-unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes Ijen Lestari. Pengembangan ini juga dibarengi dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill atau kemampuan masyarakat desa agar lebih berkembang, selain itu pengelolaan BUMDes yang terstruktur dan baik juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti masyarakat merasa terbantu dengan adanya BUMDes Ijen Lestari ini, pendirian BUMDes Ijen Lestari ini merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang fokus kegiatannya adalah pengembangan ekonomi local melalui pariwisata yang berbasis masyarakat dan melibatkan stakeholder lain seperti pemerintah dan lembaga maupun perusahaan-perusahaan demi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya serta tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi WaSallam atas petunjuk dan bimbingan tentang kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan kemudahan kesempatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Riniati, M.P. selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi.
3. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. Selaku Koordinator Progam Studi Ekonomi Pembangunan.
4. Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran dan pengarahan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan hati dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, dan motivasi serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Aisah Jumiati, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran dan pengarahan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan hati dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, dan motivasi serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

6. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi selama masa studi.
7. Ibundaku Nurma Hidayanti dan Ayahku Hadi Supriyanto, terima kasih yang sebesar-besarnya selalu penulis ucapkan atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, keringat, kesabaran, keikhlasan dan ketulusan hatinya selama ini.
8. Esi Intan Sari IESP 2015 (Blitar) yang telah membantu tenaga dan pikiran serta memotivasi agar skripsi ini cepat selesai.
9. Keluarga besar penulis yang tidak dapat satu persatu di sebutkan terima kasih atas kasih sayang dan doa beserta dukungan selama ini.
10. Teman-teman sekalian seperjuangan kosentrasi SDM 2015 serta seluruh keluarga kosentrasi SDM tahun angkatan lainnya. Beserta teman-teman di Jurusan Ekonomi angkatan 2015.
11. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih bantuannya dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, baik saran dan kritik sangat diperlukan dalam menyempurnakan karya yang merupakan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan penulis karya selanjutnya.

Jember, 15 Oktober 2019

Penulis

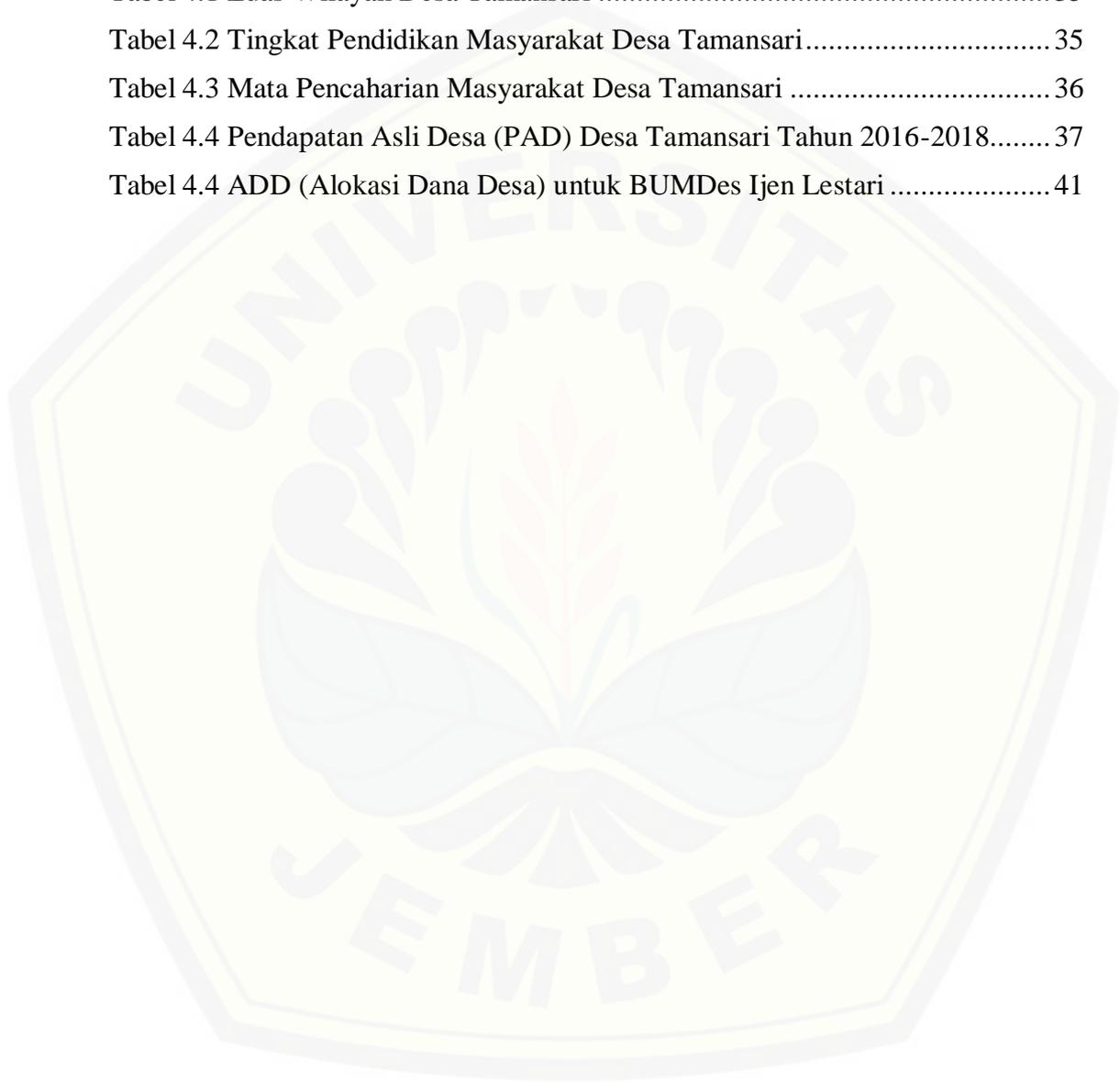
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi (Joseph Alois Schumpeter).....	9
2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat	10
2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja.....	13
2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	14
2.1.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	16
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Konsep	26

BAB 3. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.3. Unit Analisis	28
3.4 Jenis Data	29
3.5 Populasi dan Sampel	29
3.6 Metode Pengumpulan Data	30
3.7 Analisis Data	30
3.8 Definisi Operasional	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Gambaran Umum	34
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	37
4.2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	38
4.2.2 Pemberdayaan Masyarakat	39
4.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja.....	38
4.2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	40
4.3 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Pengelolaan Unit Usaha <i>Homestay</i>	44
4.2.2 Pengelolaan Unit Usaha UMKM	47
4.2.3 Pengelolaan Unit Usaha Paket Wisata	50
4.3 Pembahasan	51
4.3.1 Pengelolaan BUMDes untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat	53
4.3.2 Pengaruh BUMDes Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat.....	57
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	15
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Tamansari	35
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tamansari.....	35
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tamansari	36
Tabel 4.4 Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Tamansari Tahun 2016-2018.....	37
Tabel 4.4 ADD (Alokasi Dana Desa) untuk BUMDes Ijen Lestari	41



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan suatu negara yang ditinjau dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya sekolah, serta bertambahnya produksi barang modal dan bertambahnya sektor jasa. Menurut Boediono (2012), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurunnya, pertumbuhan ekonomi ditekankan pada tiga aspek utama, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Oleh karena itu berbagai macam faktor seperti kewenangan pemerintah pusat maupun desa perlu diidentifikasi lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat, termasuk pembangunan di pedesaan. Pemerintah sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung produktivitas masyarakat, serta memaksimalkan sumber daya dan potensi sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. Tujuannya adalah melatih kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Menurut pandangan dari segi ketenagakerjaan terdapat undang-undang mengenai hierarki struktur pemerintahan, misalnya tentang desa sebagai hierarki terendah pelaksana pemerintahan. Secara tertulis, desa memiliki otoritas kebijakan yang tertulis dan diakui dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagai unit analisis yang kuat, baik dalam arti materi maupun metafora. Komunitas desa tradisional sering diarak sebagai teladan kebajikan, dan desa modern sebagai versi asli yang rusak. J. Rigg (dalam Sutoro. E, 2018) menyatakan, gagasan tentang desa tradisional sebagai egaliter, mandiri, otonom, berorientasi pada subsistem, korporat, damai dan bermoral seringkali bertentangan dengan bukti bersejarah. Dengan demikian, hal tersebut menyajikan kesulitan ketika citra desa digunakan untuk membangun visi tentang apa yang pembangunan lakukan, dan seharusnya dilakukan di pedesaan yang berada di wilayah negara berkembang. Berdasarkan hal tersebut pandangan tentang desa saat ini dapat dijadikan sebagai

miniatur pembangunan tingkat grassroots (akar rumput), dimana pembangunan hendaknya dilakukan ditingkat desa sebagai penopang pembangunan di tingkat daerah maupun nasional, tetapi untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan kajian dan langkah yang mendalam. Dilihat dari sudut pandang historis, jauh sebelum Indonesia merdeka, desa sudah sejak dahulu memiliki sistem tata cara pemerintahan yang berlandaskan adat istiadat.

Desa merupakan salah satu institusi yang otonom berdasarkan adat istiadat dan tradisi serta merupakan agen terdepan dalam pembangunan suatu negara yang menjadi sebuah lingkup susunan pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat yang mempunyai peranan menjalankan otonomi sebagai alternatif jalan menjadikan masyarakat lebih sejahtera, maka dari itu otonomi daerah pada dasarnya mengandung keleluasaan berprakarsa dan kebebasan memerlukan pengawasan dan bimbingan pemerintah sehingga tidak menjadi kedaulatan (Ni'matul Huda, 2012:13). Pemerintah pusat dalam menjalankan program-programnya sangatlah membutuhkan pemerintah desa sebagai ukuran keberhasilan program yang dijalankan, dan kemudian pemerintah desa mensosialisasikan dan menyalurkan program tersebut kepada masyarakat.

Setiap desa mempunyai potensi dan karakteristik sendiri untuk mengelola desa serta memiliki kewenangan yang sama dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri secara penuh. Kewenangan desa tersebut berupa pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Semua yang menyangkut desa telah diatur dalam RUU Desa yang telah disahkan menjadi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program

ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Pemerintah Desa juga mempunyai peran yang sangat penting di dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan AFTA (*Asean Free Trade Area*). Dengan adanya BUMDes, masyarakat desa akan mendapatkan rangsangan untuk lebih mandiri dan siap untuk menghadapi kondisi perekonomian tersebut. Kemandirian desa untuk mengelola sumber daya alam serta potensi yang lainnya harus diupayakan guna meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan dengan berbagai macam program pemerintah. Segala program yang akan diterapkan harus dikaji secara detail untuk menyesuaikan kecocokan program tersebut dengan karakteristik masyarakat desa. Salah satu program pemerintah yang diterapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga sosial yang mengutamakan kepentingan sosial dalam penyediaan pelayanan masyarakat. Selain itu sebagai lembaga komersial mempunyai tujuan mencari laba dengan menawarkan barang dan jasa (sumber daya lokal). Prinsip yang dimiliki BUMDes dalam usahanya adalah efektivitas dan efisiensi. BUMDes sebagai badan hukum mempunyai karakteristik yang beragam sesuai dengan tradisi, adat istiadat, potensi, dan sumber daya yang dimiliki setiap desa.

Pembangunan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes, sebenarnya bukan suatu hal baru meskipun masih baru diperkenalkan beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah. Menurut Sutoro Eko dalam Herry Kamaresid (2016: 1) dari dulu sudah dikenal bermacam lembaga keuangan mikro dan lembaga sosial masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti: KUPeDES, KCK, UEDSP, KUD, BINMAS, BKD, LPD yang ada di Bali sejak tahun 1985. Beberapa waktu terakhir muncul beberapa nama dana bergulir yang dikelola oleh kelompok masyarakat seperti Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang ada dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Semua itu merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk pemerintah. Menurut Herry Kamaroesid (2016:1) tujuan dari pembentukan LKM ini adalah pemerintah ingin membebaskan masyarakat desa dari rentenir dan membantu

masyarakat khususnya kaum miskin sekaligus memberi akses kredit permodalan usaha karena banyak sekali bank-bank BUMN maupun swasta yang tidak *pro poor*.

Sebelum mengenal BUMDes, desa-desa di pulau Jawa sudah banyak yang menjalankan berbagai macam usaha desa seperti ekonomi kreatif dan bisnis sosial. Sebagai contoh di Yogyakarta, hampir seluruh desa di perkotaan seperti Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo memiliki ruko-ruko milik aset desa yang disewakan kepada pelaku ekonomi. Laba yang diperoleh dari penyewaan ruko tersebut yang jumlahnya lebih besar daripada alokasi dana dari pemerintah yang digunakan sebagai pendukung kegiatan usaha masyarakat, kesejahteraan perangkat desa dan juga digunakan sebagai modal untuk pembangunan fasilitas publik. Desa-desa yang berada di wilayah Bantul banyak yang mengembangkan usahanya di bidang kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat. Di Gunungkidul yang terkenal dengan permasalahan air bersih yang cukup serius, maka disana banyak Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes) yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat. Desa-desa di Sleman yang banyak mengembangkan usahanya dibidang pariwisata khususnya di kaki Gunung Merapi yang dikelola oleh masyarakat setempat.

BUMDes haruslah memiliki perbedaan dengan lembaga di pedesaan lainnya agar kinerja dan kontribusi terhadap perekonomian desa bisa terlihat secara signifikan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan adanya BUMDes dengan pengelolaannya yang tepat guna, maka hal tersebut merupakan perwujudan dari pengelolaan potensi desa yang dilakukan secara emansipasi, transparansi, partisipatif, akuntabel dan sustainaabel.

Badan Usaha Milik Desa didirikan dan dibentuk oleh pemerintah desa dengan pengelolaan dan kepemilikan modal dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dasar pembentukan BUMDes adalah Permendagri No. 39 Tahun 2010 yang terdapat pada bab II tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Tahap pertama dalam pembentukan BUMDes adalah berasal dari pemerintah kabupaten dengan menetapkan pedoman tata kelola pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Tahap selanjutnya yaitu pemerintah desa membentuk dan mengelola BUMDes sesuai dengan pedoman dari pemerintah daerah. Pembentukan BUMDes

juga diatur dalam UU N0. 32 Tahun 2004 tentang otonomi Daerah yang terdapat pada pasal 213 ayat 1 mengenai pemerintah desa, bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Kepemilikan lembaga BUMDes ini dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat (PP-RPDN, 2007:1).

Upaya pembentukan dan pengoptimalan pengelolaan BUMDes tentunya membutuhkan berbagai strategi serta keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program yang sudah ditentukan, maka dari itu masyarakat akan merasa memiliki sebagai dongkrak pemicu semangat peran masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 tentang Desa, BUMDes ini nantinya harus sesuai dengan pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, lingkungan secara berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tahap awal pembentukan BUMDes, banyak sekali masyarakat yang belum memahami tentang BUMDes, maka dari itu sebelumnya dibutuhkan sosialisasi terlebih dahulu. Pada tahap ini merupakan tahap pondasi serta penentuan keberhasilan pendirian BUMDes. Sosialisai tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah desa secara langsung ataupun bekerja sama dengan lembaga atau perseorangan yang memiliki pemahaman luas tentang BUMDes. Dalam proses sosialisai, tidak hanya sekedar menjelaskan pengertian dari BUMDes saja, melainkan harus menguapayakan kepada masyarakat desa agar mereka yakin bahwa dengan adanya BUMDes, perekonomian di desa mereka akan terangkat. Selain itu dalam proses sosialisai pemerintah desa harus menyediakan ruang untuk konsultasi saat masyarakat desa mengalami permasalahan, agar usaha mereka bisa berjalan dengan lancar.

Dalam permendagri terdapat substansi yang inovatif. Pertama, Pembentukan BUMDes dilakukan secara kondisional, yang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai dasar pedoman pembentukan BUMDes. Dalam pasal ke-5 sudah dijelaskan mengenai pembentukan BUMDes sebagai berikut:

- a. Potensi usaha yang dimiliki masyarakat;

- b. Pembentukan bumdes atas inisiatif masyarakat atau pemerintah desa yang di setuju dalam musyawarah bersama;
- c. Dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok;
- d. Terdapat sumber daya desa yang dapat dimanfaatkan secara optimal;
- e. Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- f. Sumber daya manusia disana harus mampu mengelola dengan baik.

Kedua, kepemilikan BUMDes bukan hanya berada pada perseorangan, melainkan milik pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes berbeda dengan bentuk struktur koperasi yang hanya mensejahterakan anggotanya saja akan tetapi BUMDes mementingkan kepentingan desa dan masyarakat. Ketiga pembentukan BUMDes bersifat deliberatif, inklusif dan partisipan yang berarti, pembentukan BUMDes tidak bisa dibentuk oleh pemerintah desa saja melainkan harus berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dan komponen masyarakat. Keempat, dalam pengelolaan BUMDes bersifat teknokratis dan demokratis. Dimensi demokratis tidak hanya berfokus pada musyawarah desa tetapi juga bisa dilihat dari komponen akuntabilitasnya, sedangkan dimensi teknokratis diwujudkan dalam kejelasan pembagian kerja.

Keberadaan BUMDes sangat penting untuk menstimulasi perekonomian masyarakat desa dengan mengandalkan kemampuan dari pemerintah desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa. Pengelolaan BUMDes harus menerapkan asas kebersamaan sebagai dasar untuk memperkuat aspek kelembagaan dan memperkuat perekonomian khususnya masyarakat desa. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente (Nucholis, 2011).

Melihat pentingnya BUMDes bagi masyarakat desa bagi peningkatan perekonomian masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan permodalan kepada setiap desa berupa dana desa yang diberikan sebagai modal BUMDes di seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi. Dengan terbentuknya BUMDes di masing-masing desa diharapkan perekonomian desa akan terangkat dilihat dari segi penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

Desa Taman sari merupakan Salah satu desa di Banyuwangi yang dikenal sebagai desa wisata berbasis *smart* kampung yang dirintis sejak tahun 2016 yang terletak kurang lebih 24 Km dari pusat Kota Banyuwangi. Desa Tamansari memiliki berbagai macam potensi yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat apabila dikelola dengan baik. Salah satu potensi yang paling besar disana adala potensi alamnya yang dapat dijadikan wisata alam. Apabila dilihat dari segi wisatanya, Desa Tamansari merupakan desa yang terletak di lereng Gunung Ijen yang terkenal dengan kawah yang indah dan *blue fire*, yang merupakan *icon* Kabupaten Banyuwangi sekaligus *icon* wisata Indonesia. Selain Kawah Ijen, masih banyak lagi potensi wisata alam yang berada di Desa Tamansari seperti sendang seruni, kampung bunga, kampung penambang, hutan pinus dan lainnya. (inovasidesa.kemendes.go.id)

Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik kategori pemanfaatan jejaring bisnis dari Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kompas.com). Penghargaan atas keberhasilan itu merupakan kerja keras dari pengelolaan BUMDes di Desa Tamansari yang bernama BUMDes Ijen Lestari. BUMDes ijen Lestari dalam naungan Pemerintah Desa Tamansari, mengembangkan beraneka ragam usaha guna menunjang potensi wisata diantaranya seperti kendaraan wisata, penginapan (*homestay*), *tour guide*, dan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi pengaruh BUMDes terhadap tingkat perekonomian masyarakat Desa Tamansari dengan judul “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka menjadi permasalahan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi ?

2. Seberapa besar pengaruh BUMDes terhadap tingkat perekonomian masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengelolaan BUMDes di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.
2. Menganalisis pengaruh BUMDes terhadap tingkat perekonomian masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji mengenai pengaruh BUMDes terhadap perekonomian masyarakat

2. Mafaat Praktis

- a. Bagi peneliti, peneitian ini digunakan sebagai sarana untuk mengetahui seberapa pentingnya BUMDes bagi perekonomian masyarakat.
- b. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapata digunakan sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan peran BUMDes bagi perekonomian masyarakat.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian mengenai peranan BUMDes bagi perekonomian masyarakat.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi (Joseph Alois Schumpeter)

Tokoh ekonom yang bernama Joseph Alois Schumpeter mengemukakan teori tentang pertumbuhan ekonomi dalam bukunya *Theory of Economic Development* yang diterbitkan di Jerman pada tahun 1911 yang kemudian direvisi dan diuraikan dalam buku *Business Cycles* (1939) dan *Capitalism Socialism and Democracy* (1942) yang tidak mengalami perubahan yang begitu penting. Joseph Alois Schumpeter adalah ekonom dan ilmuwan politik yang berasal dari Amerika-Austria.

Schumpeter membedakan arti dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output masyarakat yang disebabkan adanya penambahan terhadap faktor produksi tanpa harus dibarengi dengan perubahan “teknologi” produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para *entrepreneur*.

Joseph Alois Schumpeter berpendapat bahwa sebuah sistem ekonomi kapitalis adalah dasar pembangunan dan sistem ekonomi yang paling bagus dalam menciptakan suatu pembangunan ekonomi yang pesat. Menurut Schumpeter, proses dalam berkembangnya sebuah perekonomian memiliki faktor utama dalam proses pembangunannya yaitu sebuah inovasi yang pelakunya adalah seorang *entrepreneur* dan *innovator*. Kemajuan tingkat perekonomian masyarakat hanya bisa dikembangkan dengan adanya inovasi-inovasi oleh seorang entrepreneur. Dan kemajuan tingkat ekonomi tersebut bisa diartikan sebagai meningkatnya output total masyarakat.

Pembangunan ekonomi berawal dari suatu lingkungan sosial, teknologi dan politik yang dapat menunjang kreatifitas inovatornya. Adanya potensi lingkungan yang baik akan sangat menunjang dalam memunculkan suatu ide dan gagasan dalam perekonomian. Tentu saja dalam merintis suatu ide dan gagasan tidak akan semua berhasil dalam melakukan inovasi tersebut, tetapi apabila berhasil akan besar

kemungkinannya untuk mendapatkan hasil di atas keuntungan normal karena secara tidak langsung akan berada dalam posisi monopoli. Keuntungan monopoli akan menjadi rangsangan bagi para calon inovator karena hasrat ingin memiliki keuntungan yang besar. Menurut pandangan Schumpeter terdapat 5 macam bentuk kegiatan yang termasuk sebagai sebuah inovasi :

- a. Pengenalan barang baru;
- b. Pembukaan pasar baru;
- c. Pengenalan metode produksi baru;
- d. Pembentukan organisasi baru pada sektor industri.
- e. Pengenalan sumber penawaran baru bahan mentah maupun barang semi manufaktur.

Schumpeter juga memberikan syarat terhadap terbentuknya sebuah inovasi, menurutnya dalam sebuah inovasi harus mempunyai dasar yang menopang terbentuknya inovasi tersebut yaitu :

- a. Adanya calon inovator atau wiraswasta di dalam masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menciptakan inovasi;
- b. Adanya lingkungan sosial dan politik serta teknologi yang merangsang semangat para inovator untuk memunculkan ide dan gagasan usaha.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya merupakan salah satu hal yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pelatihan keterampilan, peminjaman modal, dan masih banyak bantuan lainnya. Memberdayakan masyarakat merupakan salah satu cara yang paling bagus karena arti dari pemberdayaan tersebut adalah mengembangkan kegiatan suatu kelompok yang berawal dari keadaan kurang berdaya menjadi lebih mempunyai daya guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Adi, 2005:161-162).

Secara konsep, pemberdayaan (*empowermen*) berasal dari kata *power* yang memiliki arti kekuatan atau kekuasaan. Maka dari itu hal yang paling utama sebagai

dasar ide pemberdayaan tidak akan terlepas dari konsep kekuatan atau kekuasaan. Menurut (Ife, 1995:161-162) pengertian kekuasaan sangatlah luas, dan tidak hanya berhenti pada kekuasaan politik, akan tetapi juga merupakan kekuasaan orang dari beberapa hal berikut :

- a. Ide (gagasan) : kemampuan seseorang untuk menyampaikan suatu pendapat atau ide didalam forum tanpa mendapatkan tekanan dari siapapun;
- b. Pengertian kebutuhan : kemampuan seseorang untuk menentukan kebutuhan yang selaras dengan keinginan dan aspirasinya;
- c. Kesempatan-kesempatan hidup dan pilihan-pilihan personal : Kemampuan seseorang dalam penentuan keputusan mengenai pilihan yang telah disesuaikan dengan dirinya sendiri seperti pekerjaan, pakaian, gaya hidup, dan lainnya;
- d. Aktivitas ekonomi : kemampuan seseorang untuk mengelola dan memanfaatkan mekanisme produksi, pertukaran barang dan jasa dan pendistribusian;
- e. Lembaga-lembaga : kemampuan untuk menggunakan, menjangkau, dan mempengaruhi pranata di masyarakat, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan pendidikan sosial;
- f. Reproduksi : kemampuan yang berkaitan dengan, pendidikan, sosialisasi, kelahiran dan perawatan anak;
- g. Sumber-sumber : kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber, kemasyarakatan dan informal.

Pemberberdayaan memiliki arti menyiapkan kepada masyarakat yang dapat berupa kesempatan, pengetahuan, sumber daya dan keahlian sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan masyarakat serta serta rela berpartisipasi dalam komunitas atau kelompok itu sendiri (Ife. 1995:182). Selain itu pemberdayaan juga dapat memiliki tujuan yang sangat kompleks yaitu meningkatkan kekuatan masyarakat yang kurang beruntung (Ife. 1995:56). Hal tersebut sangat berlaku pada pemberdayaan masyarakat, karena proses pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh suatu kelompok atau komunitas tidak akan berakhir begitu saja dengan selesainya suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Pemberdayaan yang telah di laksanakan akan tetap berjalan selama kelompok atau komunitas itu tetap hidup dan memiliki keinginan untuk memberdayakan dirinya.

Menurut Chambers dalam (Kartasmita, 1996:142) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep dalam pembangunan ekonomi yang didalamnya terdapat nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan masyarakat mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dianggap kurang mampu untuk lepas dari perangkap keterbelakangan dan kemiskinan (Kartasmita, 1996:142). Kemudian Friedman dalam (Kartasmita, 1996:143) mengatakan bahwa “Pendekatan pemberdayaan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan alternatif, yang menekankan pada anatomi di dalam pengambilan keputusan dari masyarakat secara terorganisasi, teritorial, memperkuat daya kemandirian lokal (tapi tidak autarki), kemampuan bersosial dan demokrasi secara langsung (partisipasi).”

Shardlow (1998) dalam (Adi, 2005:162) inti dari pengertian pemberdayaan adalah menjelaskan bagaimana kelompok, individu, ataupun komunitas berusaha untuk mengontrol kehidupan masing-masing dan berjuang untuk mencapai masa depan sesuai dengan harapan mereka. Shardlow memberikan sebuah gambaran mengenai gagasan yang biasa dikenal sebagai *self determination*, yaitu usaha yang dilakukan untuk memberikan konseling atau dorongan kepada klien dan memberikan motivasi kepadanya untuk menentukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya, sehingga klien mempunyai kekuasaan dan kesadaran penuh untuk membentuk masa depannya sendiri.

Kesimpulan dari pengertian pemberdayaan tersebut adalah pemberdayaan dapat menjadikan seseorang yang kurang berdaya menjadi berdaya, proses memperoleh kekuatan, kompetensi, memaksimalakan kualitas hidup, memperoleh kebebasan dan memerdekakan diri sendiri. Pemberdayaan menekan pada proses memperoleh *goal*, yaitu sebuah tujuan yang berorientasi terhadap proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan pengembangan kapasitas guna memecahkan masalah secara kooperatif dengan dasar kemampuan dan kemauan

untuk menolong dirinya sendiri (*self help*) sesuai dengan prinsip demokratis (Adi, 2005:70-75).

2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1998:92), kemampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria disebut sebagai penyerapan tenaga kerja. Jumlah penyerapan tenaga kerja bisa sama atau bahkan lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja yang dapat berpengaruh terhadap pengangguran. Apabila jumlah penyerapan tenaga kerja sama dengan jumlah kesempatan kerja maka tidak ada pengangguran. Begitupula sebaliknya, apabila jumlah penyerapan tenaga kerja lebih kecil daripada kesempatan kerja maka akan memicu terjadinya pengangguran. Ada empat faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja apabila dilihat dari segi elastisitasnya, yaitu :

- a. Proporsi biaya pekerja terhadap semua biaya produksi. Semakin besar biaya pekerja terhadap semua biaya produksi, maka akan semakin besar pula biaya elastisitas tenaga kerjanya;
- b. Adanya substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain. Artinya, semakin kecil substitusi terhadap faktor produksi lain terhadap tenaga kerja, maka akan semakin kecil pula elastisitas terhadap permintaan tenaga kerja. Sebagai contoh adalah modal, semakin kecil substitusi modal terhadap tenaga kerja maka akan semakin kecil juga elastisitas pada teknologi. Elastisitas akan semakin kecil apabila keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja semakin tinggi.
- c. Elastisitas permintaan terhadap barang yang diproduksi. Artinya semakin besar elastisitas barang yang diproduksi maka akan semakin besar pula elastisitas permintaan tenaga kerja.
- d. Elastisitas persediaan faktor produksi lainnya akan semakin elastis pula dalam permintaan kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja juga bergantung kepada elastisitas faktor pelengkap lain dalam proses produksi seperti tenaga listrik, bahan mentah, dan lainnya. Seperti mesin, semakin besar kapasitas kebutuhan akan mesin maka akan semakin tinggi pula kebutuhan akan faktor produksi

pelengkap lainnya, yang artinya semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap maka akan semakin besar pula elastisitas permintaan tenaga kerjanya.

Penyerapan tenaga kerja menggambarkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Permintaan tenaga kerja dapat terjadi karena orang tersebut dirasa mampu meningkatkan produksi barang dan jasa yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Peningkatan jumlah tenaga kerja bergantung pada peningkatan permintaan konsumen atas suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan (Simanjuntak, 2001:16).

Menurut Kuncoro (2002:45), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang telah terisi yang terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang sedang bekerja tersebar dan terserap di berbagai sektor perekonomian. Penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Maka dari itu penyerapan tenaga kerjajuga dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja

Kesimpulan dari pengertian diatas adalah bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang sangat erat dengan permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi permintaan tenaga kerja maka akan semakin besar pula penyerapan tenaga kerjanya. Besarnya Kemampuan penyerapan tenaga kerja tidak akan sama antara satu sektor dengan sektor yang lainnya tergantung potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah.

2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha mikro merupakan skala usaha produktif yang dimiliki individu atau kelompok yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang yaitu mempunyai aset usaha paling banyak sebesar Rp 50 juta atau memiliki penghasilan usaha paling besar Rp 300 juta per tahun.

Usaha kecil merupakan skala usaha produktif yang dimiliki individu atau kelompok yang bukan berbentuk cabang perusahaan atau anak perusahaan dari usaha menengah atau usaha sersekala besar. Dapat dikatakan sebagai usaha kecil

apabila telah memenuhi kriteria tersebut dan yang ada pada Undang-Undang dengan nilai aset usaha lebih dari Rp 50 juta samapai Rp 500 juta dengan hasil usaha Rp 300 juta samapai Rp 2,5 Milyar per tahun.

Usaha Menengah merupakan skala usaha produktif yang dimiliki individu atau kelompok yang bukan berbentuk cabang atau anak perusahaan dari usaha besar. Dapat dikatakan sebagai usaha menengah apabila telah emenuhi kriteria tersebut dan yang ada pada Undang-Undang dengan nilai aset usaha yang dimiliki lebih dari Rp 500 juta samapai Rp 10 milyar dengan hasil usaha Rp 2.5 milyar samapai Rp 50 milyar per tahun.

Tabel 2.1 Skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Skala Usaha	Aset (Rp)	Penghasilan (Rp)	Periode (Tahun)	Tenaga Kerja (Orang)
Usaha Mikro	< 50 juta	< 300 juta	1	< 5
Usaha Kecil	50 juta s/d 500 juta	300 juta s/d 2,5 milyar	1	5-9
Usaha Menengah	500 juta s/d 10 Milyar	2,5 milyar s/d 50 milyar	1	20-99

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Karakteristik Usaha Kecil Menengah dan Menengah (UMKM)

Menurut Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono (2004:14), Untuk melihat karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, ada beberapa kriteria mengenai UMKM. Apabila dilihat dar aspek ciri-cirinya usaha kecil dan menengah memiliki ciri-ciri dasar yang sama, yaitu :

1. Struktur organisasi sederhana;
2. Pembagian kerja kurang;
3. Kurangnya pembedaan atas aset pribadi dan kelompok;

4. Aktivitas berbentuk formal sangat sedikit, dan kurangnya tahap perencanaan;
5. Staf tidak berlebihan; dan
6. Manajerial yang kurang.

Sedangkan menurut Tulus T.H. Tambunan (2009:6-10), karakteristik UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kurang lebih sepertiga pengusaha UMKM rata-rata berusia 45 tahun, dan yang berusia dibawah 25 tahun hanya sekitar 5,25%;
2. Sebagian besar alasan pendirian UMKM adalah berupa faktor ekonomi.;
3. Sebagian Besar UMKM tidak berbadan hukum;
4. Kriteria tenaga kerja yang diperlukan usaha kecil tidak harus berpendidikan formal tinggi; dan
5. Sebagian besar melibatkan keluarga sebagai pekerja.

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) (2015:45), latar belakang bisnis UMKM di bedakan menjadi 7 sektor, yaitu :

1. Sektor pertanian;
2. Sektor perkebunan;
3. Sektor perdagangan;
4. Sektor jasa;
5. Sektor peternakan;
6. Sektor perikanan; dan
7. Sektor industri pengolahan.

2.1.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah suatu badan usaha yang sebagian besar bahkan seluruh modalnya dimiliki oleh desa dengan penyertaan secara langsung yang berasal dari alokasi dana pemerintah maupun berasal dari kekayaan asli desa yang dipisahkan untuk mengelola jasa pelayanan, aset, dan usaha lainnya yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat desa. (Herry Kamaroesid, 2016:13)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebenarnya telah lama di bentuk oleh pemerintah, akan tetapi kinerjanya tidak berjalan dengan yang diharapkan. Jauh Sebelum terbentuknya Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementrian Desa, dan transmigrasi, pemerintah telah merancang suatu undang-undang yang terkait dengan keberadaan BUMDes. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 108 yang berbunyi “Desa dapat mendirikan suatu badan usaha atas dasar peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pemerintah merancang lagi terkait dengan BUMDes pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang berbunyi (1) Desa dapat mendirikan suatu badan usaha yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. (2) Badan usaha milik desa yang dimaksud pada ayat pertama harus berpedoman kepada perundang-undangan. (3)Badan usaha milik desa dapat mengajukan pinjaman berdsarkan perundang-undangan.

Prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting untuk dipahami oleh pelaku BUMDes. Menurut Herry Kamaroesid (2016:20) terdapat 6 prinsip pengelolaan BUMDes yaitu :

- a. *Partisipatif*, seluruh komponen yang berada dalam BUMDes harus bersedia memberikan kontribusi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong keberlangsungan usaha;
- b. *Kooperatif*, seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus menanamkan keinginan kuat untuk bekerja sama yang sedemikian rupa demi kelanggengan usaha yang didirikan;
- c. *Transparan*, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes harus bersifat terbuka kepada seluruh anggota, termasuk dalam hal keuangan;
- d. *Akuntabel*, Semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis;
- e. *Sustainabel*, usaha harus dapat dikembangkan dan dipertahankan oleh anggota dalam wadah BUMDes;

f. *Emansipatif*, seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi.

Dalam pendirian BUMDes haruslah sejalan dengan program perencanaan desa. Artinya, rancangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes merupakan sebuah bentuk realisasi dari perencanaan pembangunan desa yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Apabila terdapat program usaha dalam BUMDes yang dirasa belum tercantum di dalam perencanaan desa, maka akan dilakukan *review* RPJM Desa dalam forum musyawarah desa. RPJM Desa adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari peraturan desa yang artinya RPJM Desa merupakan bagian dari hukum desa (Heery Kamaroesid, 2016:17).

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari keinginan untuk bergotong royong serta rasa kekeluargaan demi tujuan tertentu seperti keinginan untuk memperbaiki keadaan perekonomian. BUMDes menjalankan setiap program usahanya berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Maka dari itu diperlukan upaya yang serius guna mempertahankan keberlangsungan usaha agar berjalan dengan efisien, mandiri, profesional dan efektif.

BUMDes didirikan dengan maksud menampung seluruh apresiasi dari masyarakat desa dalam bidang ekonomi maupun pelayanan umum. Dalam pasal 3 permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, BUMDes dibentuk dengan tujuan :

- a. Membuka lapangan pekerjaan;
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli desa;
- c. Memperbaiki serta meningkatkan perekonomian desa;
- d. Mengoptimalkan aset yang dimiliki desa untuk dikelola sedemikian rupa, yang bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- e. Mengembangkan usaha masyarakat di dalam pengelolaan potensi yang dimiliki desa;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperbaiki pemerataan ekonomi desa dan pelayanan umum;

- g. Menciptakan jaringan dan peluang pasar guna mendukung kebutuhan layanan masyarakat.

Bagian keempat klasifikasi jenis usaha BUMDes adalah :

- a. Bisnis keuangan (financial business), yaitu pemenuhan kebutuhan usaha dalam skala kecil (mikro) yang dijalankan oleh masyarakat desa;
- b. Bisnis Perantara (brokering), yaitu bisnis yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat;
- c. Bisnis produksi atau dagang (trading), yaitu memproduksi suatu barang yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atau dapat dipasarkan secara luas;
- d. Bisnis sosial (social business), yaitu bisnis sederhana yang bertujuan untuk memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat untuk memberikan keuntungan finansial;
- e. Bisnis penyewaan (renting), yaitu bisnis yang berbentuk menyewakan suatu barang kepada masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- f. Usaha bersama (holding) yang dapat dijadikan induk dari beberapa unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat dalam skala lokal maupun kawasan pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan hidup (konsumtif dan produktif) khususnya masyarakat desa dengan pelayanan distribusi kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan non-anggota dengan menetapkan harga yang sesuai dengan standar pasar. Artinya di dalam pengelolaan BUMDes terdapat mekanisme aturan yang telah disepakati bersama, guna mencegah distorsi ekonomi yang disebabkan produk usaha dari BUMDes.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 3 yang berbunyi bahwa BUMDes dapat melakukan usahanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan pasal 5 ayat 2 butir (a) Permedesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pendirian BUMDes harus sesuai dengan kondisi sosial dan

ekonomi masyarakat, dengan demikian BUMDes dapat menjalankan usahanya pada :

- a. Kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pokok;
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelolan dan mempertahankan kelangsungan usaha pada BUMDes sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat desa;
- c. Tersedianya sumber daya desa seperti kekayaan desa yang nantinya akan dimanfaatkan secara optimal dan bisa untuk dipasarkan;
- d. Adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang dikelola secara parsial tetapi kurang akomodasi.

Menurut Herry Kamaroesid (2016:19) BUMDes merupakan sebuah wahana yang digunakan untuk menjalankan usaha di desa, yang meliputi kegiatan peleyanan perekonomian masyarakat seperti :

- a. Indusri dan kerajinan masyarakat;
- b. Perdagangan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan agrobisnis;
- c. Usaha jasa angkutan, listrik desa, jasa keuangan, dan usaha sejenisnya;
- d. Usaha penyaluran bahan pokok desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Sri Kusuma Dewi (2014), yang berjudul “Peranan Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu BUMDes dan variabel independenya adalah permodalan, jenis usaha, da mekanisme pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa, harus dimulai dengan memberikan legalitas, sehingga BUMDes dapat menjalankan tugasnya sebagai salahsatu lembaga ekonomi desa yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015), dengan judul “Evaluasi Penerapan Dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Per. Mei 2014-April 2015)”. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), RumahTangga Miskin (RTM) dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program yang dilaksanakan oleh BUMDes sudah berhasil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat Desa Babadan dalam hal peminjaman modal usaha kepada masyarakat terutama untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) kurang lebih selama tahun terakhir di periode Mei 2015-April 2015. Dengan adanya unit usaha atau kelompok dirasa sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha masyarakat dan perekonomian masyarakat bisa meningkat secara bertahap.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016), dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)”. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa dan tingkat pendapatan. Hasil dari penelitian yaitu BUMDes sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dirasa mampu memberikan bermacam-macam aspek pendukung kepada masyarakat diantaranya sebagai Mediator, Fasilitator, Motivator dan Dinamisator. Peran BUMDes yang berada di Desa Lanjut sudah sesuai dengan dasar acuan yang dimiliki oleh BUMDes, hanya saja hasil yang dicapai dirasa kurang maksimal dan dibutuhkan pengembangan lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Hudi Setyobakti (2017), dengan judul “*Identification of Bushiness Enterprises BUMDes on Social And Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Vilage District of Banyuwangi)*”. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah BUMDes sebagai variabel dependen sedangkan variabel independennya adalah aspek sosial dan aspek

ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan mencari dan menggambarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes dirasa sangat berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi. Dilihat dari aspek sosialnya banyak sekali perubahan seperti pemanfaatan kondisi demografis yang dijadikan sebagai tempat pariwisata, semakin kuat dalam mempertahankan dan melestarikan budaya lokal, dan dampak bagi kesehatan yang semakin membaik. Sedangkan apabila dilihat dari aspek ekonominya, peningkatan kualitas perekonomian masyarakat sangatlah signifikan dengan adanya pengelolaan pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja lokal dan pembangunan infrastruktur yang sangat bermanfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto dan Suwondo (2017) dengan judul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan variabel independennya adalah keberadaan BUMDes, Kontribusi BUMDes, dan faktor penghambat serta faktor pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan BUMDes telah sesuai dengan perdes, yang bertujuan sebagai penguatan ekonomi desa. Pembentukan BUMDes telah sesuai dengan ADART yang telah tersusun dengan struktur organisasinya tetapi masih terkendala dalam permodalan. Kontribusi BUMDes di Desa Landungsari dirasa kurang maksimal sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Amelia Sri Kusuma Dewi (2014)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa	Variabel dependen : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Variabel independen : permodalan, jenis usaha, mekanisme pengelolaan.	kuaitatif dengan pendekatan deskriptif	Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa harus dimulai dengan memberikan legalitas, sehingga BUMDes dapat menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi desa yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli desa (PADes)serta meningkatkan perekonomian desa secara menyeluruh.
2.	Nugroho (2015)	Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014-April 2015)	Variabel dependen : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Variabel Independen: Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM)	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Program yang dilaksanakan oleh BUMDes sudah berhasil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat Desa Babadan dalam hal peminjaman modal usaha kepada masyarakat terutama untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) kurang lebih selama tahun terakhir di periode Mei 2015-April 2015. Dengan adanya unit usaha atau kelompok dirasa sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha masyarakat

				dan perekonomian masyarakat bisa meningkat secara bertahap.
3.	Kurniawan (2016)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)	Variabel dependen : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Variabel Independen: Pendapatan asli desa dan tingkat pendapatan masyarakat	Kualitatif Pendekatan Deskriptif BUMDes sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dirasa mampu memberikan bermacam-macam aspek pendukung kepada masyarakat diantaranya sebagai Mediator, Fasilitator, Motivator dan Dinamisor. Peran BUMDes yang berada di Desa Lanjut sudah sesuai dengan dasar acuan yang dimiliki oleh BUMDes, hanya saja hasil yang dicapai dirasa kurang maksimal dan dibutuhkan pengembangan lagi.
4.	Moh. Hudi Setyobakti (2017)	<i>Identification of Bushiness Enterprises BUMDes on Social And Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Vilage</i>	Variabel dependen : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Variabel Independen: Aspek sosial dan aspek ekonomi.	Deskriptif Kualitatif BUMDes dirasa sangat berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi. Dilihat dari aspek sosialnya banyak sekali perubahan seperti pemanfaatan kondisi demografis yang dijadikan sebagai tempat pariwisata, semakin kuat dalam mempertahankan dan melestarikan budaya lokal, da dampak bagi kesehatan yang semakin membaik. Sedangkan apabila dilihat dari aspek ekonominya, peningkatan kualitas perekonomian masyarakat sangatlah signifikan dengan adanya

					pengelolaan pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja lokal dan pembangunan infrastruktur yang sangat bermanfaat
5.	Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto dan Suwondo (2017)	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)	Variabel dependen : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Variabel independen : Keberadaan BUMDes, Kontribusi BUMDes, faktor penghambat dan pendukung.	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Keberadaan BUMDes di Desa Landungsari telah sesuai dengan perdes, yang bertujuan sebagai penguatan ekonomi desa. Pembentukan BUMDes telah sesuai dengan ADART yang telah tersusun lengkap dengan struktur organisasinya tetapi masih terkendala dalam permodalan. Kontribusi BUMDes di Desa Landungsari dirasa kurang maksimal sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

Berdasarkan 5 penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. Persamaan

Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjelaskan tentang bagaimana perkembangan dan pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap perekonomian masyarakat desa. Selain itu penelitian mengenai BUMDes kebanyakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

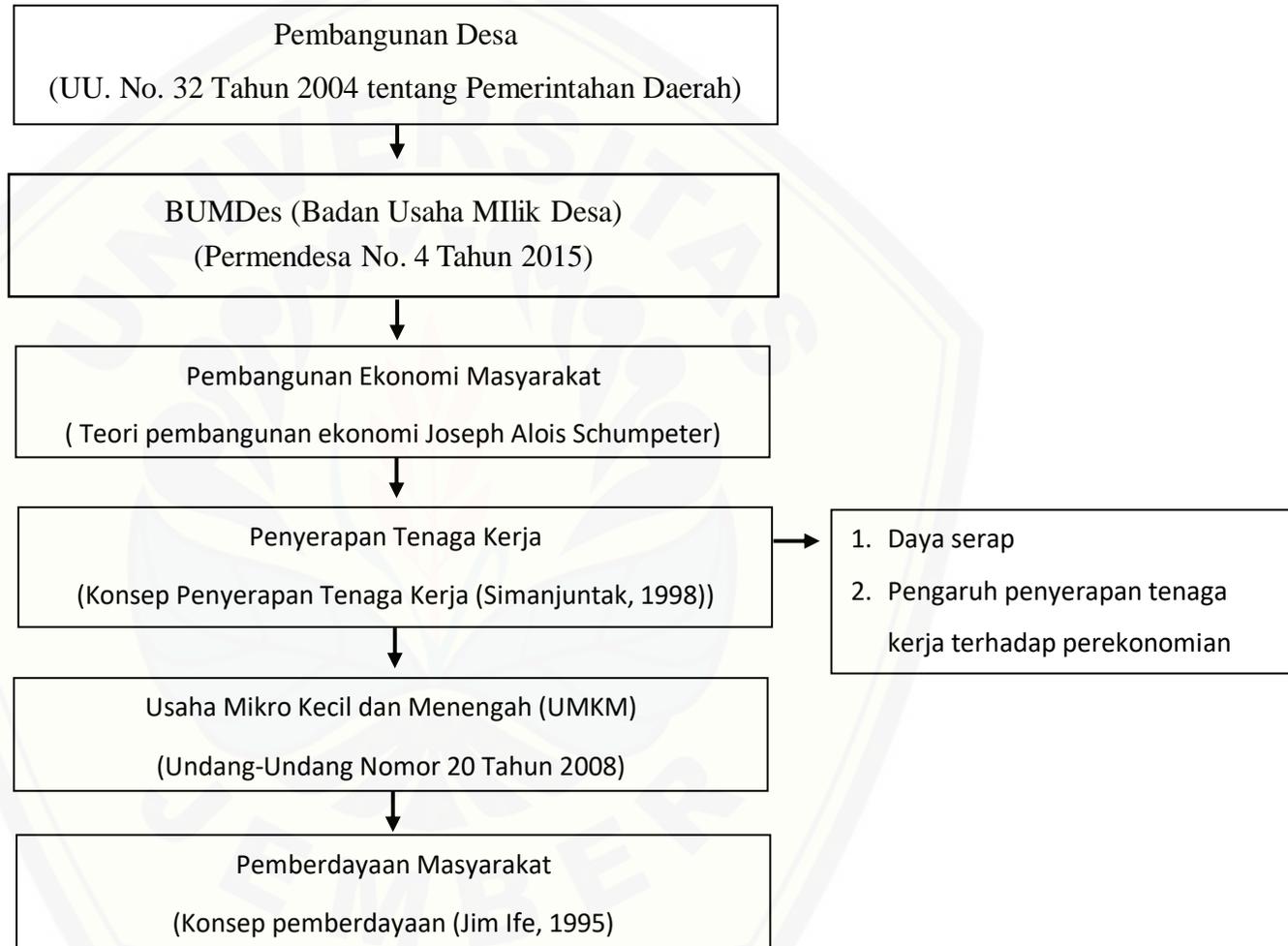
2. Perbedaan

Perbedaan yang paling terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah, peneliti memasukkan variabel pemberdayaan masyarakat dan UMKM sebagai salah satu variabel penjelas.

2.3 Kerangka Konsep

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat pada dasarnya bertujuan sebagai sarana untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang dari awalnya kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Pembentukan BUMDes di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang menjadi objek peneliti dalam penelitian ini, mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam mengelola potensi alamnya. Konsep di dalam penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh sebelum dan sesudah terbentuknya BUMDes terhadap perekonomian masyarakat desa di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif peneliti bertujuan mencapai hasil akhir yaitu menggambarkan keberadaan BUMDes yang memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program-program yang dijalankan dengan menggunakan prinsip transparan, partisipatif, kooperatif, sustainabel, kooperatif dan emansipatif. Selain itu peneliti juga ingin menganalisis pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, UMKM dibawah naungan BUMDes Ijen Lestari, sehingga perekonomian masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih baik.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti pengaruh setelah didirikannya BUMDes terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fenomena yang terjadi. Sebagai mana yang telah dijelaskan di latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah meneliti pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap tingkat perekonomian masyarakat, bahwasanya dalam masalah ini metode yang paling sesuai adalah kualitatif untuk meneliti pengaruh sebelum dan sesudah terbentuknya BUMDes di Desa Tamansari. Penelitian kualitatif adalah tradisi pada ilmu sosial yang memiliki dasar pada pengamatan kepada manusia, lingkungan dan peristilahannya. Metode kualitatif diartikan sebagai sebuah metode dalam penelitian untuk meneliti kondisi alamiah objek penelitian dimana peneliti adalah instrumen kuncinya.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dengan BUMDes-nya yang bernama Ijen Lestari yang didirikan pada tahun 2016. BUMDes Ijen Lestari merupakan salah satu BUMDes yang dijadikan percontohan desa lain di Banyuwangi karena manajemennya yang sangat baik. Dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat melimpah, BUMDes ijen Lestari mampu mengelolanya dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilaksanakn dari Bulan Mei 2019 sampai dengan selesai.

3.3. Unit Analisis

Dalam penelitin ini menggunakan unit analisis berupa manusia dan organisasi. Data yang diambil berawal dari pihak internal pemerintah desa dan BUMDes Ijen Lestari. Kemudian peneliti mencocokkan data yang telah diperoleh

dengan data hasil wawancara dengan unit usaha dan masyarakat yang berada dibawah naungan BUMDes.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diabil oleh peneliti sendiri (terjun langsung ke lapang) dari responden utama guna kelengkapan penelitian dan data tersebut sebelumnya belum tersedia. Data primer diambil dengan berbagai cara yaitu melalui kuisisioner, wawancara, dan observasi.

Peneliti juga menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi untuk melengkapi serta mendukung validasi data yang di paparkan. Seperti contohnya mencari jumlah data penduduk dan lainnya yang mendukung peneliti dalam memperoleh informasi.

3.5 Populasi dan Sampel

Hal terpenting dalam sebuah penelitian adalah menentukan populasi dan sampel sebagai dua aspek yang saling berkaitan. Peneliti bermaksud untuk memfokuskan kepada sebagian anggota dari populasi. Maka dari itu populasi merupakan total keseluruhan dari segala unsur yang ada dalam lingkup penelitian, sedangkan sampel adaalah contoh atau wakil dari sebuah populasi. Maka dari itu, populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 6.288 orang (Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyuwangi, 2017).

Sampel responden dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi pada dasarnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara

mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam memperoleh data primer menggunakan teknik kuesioner yang diberikan secara langsung kepan responden. Responden dalam penelitian dapat memilih jawaban dari pertanyaan kuesioner yang telah diberikan sesuai dengan keadaan objek yang diteliti. Selain menggunakan kuesioner peneliti juga menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh sebelum dan sesudah berdirinya BUMDes terhadap tingkat perekonomian masyarakat di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Serta menggunakan metode observasi terus terang maupun observasi secara tersamar.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian terhadap peranan BUMDes terhadap perekonomian masyarakat. Analisis deskriptif adalah sebuah analisis yang dilakukan dengan cara mengamati dan mendeskripsikan suatu keadaan, objek, peristiwa dan segala sesuatu yang terkait dengan variabel dengan menggunakan kata-kata.

3.8 Definisi Operasional

Operasional adalah pemahaman tentang bagaimana cara kerja atau operasi yang dilakukan untuk memperoleh data untuk menunjukkan indikator yang dimaksud (Soehardi Sigit, 1999). Maka dari itu definisi operasional merupakan bagaimana cara mengukur dan menemukan variabel-variabel yang berada di lapangan dengan merumuskan secara padat dan jelas, serta tidak menimbulkan banyak tafsiran (Widayat dan Amirullah, 2002:23).

1. Variabel Dependen

Variabel dependen juga sering disebut dengan variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi dan disebabkan karena adanya variabel independen atau

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen yaitu BUMDes.

BUMDes adalah suatu badan usaha yang sebagian besar bahkan seluruh permodalannya dimiliki oleh desa dengan penyertaan secara langsung yang berasal dari alokasi dana pemerintah maupun berasal dari kekayaan asli desa yang dipisahkan untuk mengelola jasa pelayanan, aset, dan usaha lainnya yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat desa. (Herry Kamaroesid, 2016: 13)

2. Variabel Independen

Variabel independen yang biasa disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel Independen yaitu :

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki arti menyiapkan kepada masyarakat yang dapat berupa kesempatan, pengetahuan, sumber daya dan keahlian sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan masyarakat serta serta rela berpartisipasi dalam komunitas atau kelompok itu sendiri (Ife. 1995:182). Selain itu pemberdayaan juga dapat memiliki tujuan yang sangat kompleks yaitu meningkatkan kekuatan masyarakat yang kurang beruntung (Ife. 1995:56).

b. Penyerapan Tenaga Kerja

kemampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria disebut sebagai penyerapan tenaga kerja. Jumlah penyerapan tenaga kerja bisa sama atau bahkan lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja yang dapat berpengaruh terhadap pengangguran. apabila jumlah penyerapan tenaga kerja sama dengan jumlah kesempatan kerja maka tidak ada pengangguran. Begitupula sebaliknya, apabila jumlah penyerapan tenaga kerja lebih kecil daripada kesempatan kerja maka akan memicu terjadinya pengangguran (Simanjuntak, 1998:92).

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha mikro merupakan skala usaha produktif yang dimiliki individu atau kelompok yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Usaha kecil merupakan skala usaha produktif yang dimiliki individu atau kelompok yang bukan berbentuk cabang perusahaan atau anak perusahaan dari usaha menengah atau usaha skala besar. Usaha Menengah merupakan skala usaha produktif yang dimiliki individu atau kelompok yang bukan berbentuk cabang atau anak perusahaan dari usaha besar.

d. Pengelolaan BUMDes

Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan memberikan keputusan bagi pemerintah yang berada di desa. Upaya itu tercetus dalam badan yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kuncinya adalah pengelolaan dari pihak desa yang baik. Aset yang dimilikinya bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang secara tidak langsung akan menjadi tonggak utama dalam menambah pendapatan desa. Pengelolaan BUMDes yang benar berimplikasi pada meningkatnya perekonomian desa. Ini menandai jika desa mengalami kemajuan di berbagai sektor. Pasalnya, banyak hal yang bisa dibangun setelah badan usaha yang dibentuk bisa memberikan benefit tinggi. Bicara mengenai pengelolaan badan usaha oleh pimpinan desa, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ketika dipraktekkan dengan benar, pengelolaan bumdes akan sangat bermanfaat bagi desa.

Tahapan pertama yang bisa dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan ini meliputi pembentukan organisasi, penentuan jenis usaha, pengaturan jalannya usaha. Kesemuanya harus direncanakan secara matang demi terwujudnya badan usaha yang terus berkembang. Tahapan kedua adalah pengamatan. Pihak desa harus mengamati aset desa yang dipandang bagus untuk usaha. Tentunya, ini harus dilihat dari seberapa besar potensi berkembangnya usaha yang akan dimasuki di desa tersebut. Tahapan ketiga adalah penataan jenis usaha. Tentunya tidak hanya satu jenis usaha yang bisa dimasuki. Ada beberapa jenis usaha yang perlu dikelola di

bawahnya. Hal ini harus dikelola dengan baik supaya berjalan maksimal. Tahapan keempat adalah pemeliharaan. Bagi pemerintah desa, pemeliharaan badan usaha yang telah dibuat wajib hukumnya. Peralnya, dana desa yang telah dikeluarkan harusnya tidak dibiarkan begitu saja. Perlu pemeliharaan khusus. Baik itu menambah modal, sampai menjaga keamanannya.



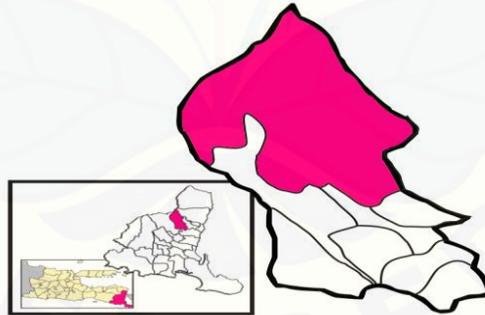
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Desa Tamansari merupakan salah satu desa yang terletak dikawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Kabupaten Banyuwangi. Nama Desa Tamansari ini diambil dari nama salah satu tempat yang digunakan untuk tempat penginapan. Secara administratif Desa Tamansari terbagi atas tujuh dusun yaitu:

- a. Dusun Ampel Gading;
- b. Dusun Blimbingan;
- c. Dusun Kebun Dadap;
- d. Dusun Jambu;
- e. Dusun Tanahlos;
- f. Dusun Sumberwatu;
- g. Dusun Krajan.

Secara Geografis Desa Taman Sari tertelak pada ketinggian 650m dari permukaan laut dan memiliki luas wilayah 2767,16 Ha.



Gambar 4.1 : Peta Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Tamansari,_Licin,_Banyuwangi

Letak Desa Tamansari sangatlah strategis dan tidak terlalujauh dengan pusat kota, yaitu sekitar 24 km atau bias ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota. Letak desa yang dilewati oleh wisatawan menuju wisata Kawah Ijen menjadikan desa tamansari memiliki banyak potensi, salah satunya dijadikan sebagai tempat persinggahan atau rest area Kawah Ijen.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Tamansari

No	Keterangan	Luas Wilayah (Ha)
1	Perkebunan	1951,50
2	Lahan Kering (Ladang/tegalan)	586,365
3	Bangunan sekolah, pasar dan toko	31,921
4	Pemukiman penduduk	17,630
5	Sawah	128
6	Wisata Pegunungan	5,5
7	Lain-lain	4,6
	Jumlah	2767,16

Sumber: Data Monografi Desa Tamansari 2015, Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Tamansari memiliki wilayah terluas pada perkebunan dibandingkan dengan wilayah yang lain, perkebunan yang terdapat di Desa Tamansari adalah perkebunan kopi sehingga wilayah yang paling luas adalah pada wilayah perkebunan. Desa Tamansari berbatasan dengan Desa Kampung Anyar disebelah utara, Desa Banjar disebelah selatan, Desa Licin di sebelah timur dan Kabupaten Bondowoso disebelah barat.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tamansari

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tamat Sd/Sederajat	2.920
2	Belum tamat SD/Sederajat	2.230
4	Tidak Sekolah	721
5	Tamat SMP/Sederajat	700
6	Tamat SMA/Sederajat	400
7	Tamat Akademi	25
	Jumlah	6.996

Sumber: Data Monografi Desa Tamansari 2015, Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan terbanyak di Desa Tamansari adalah SD/ sederajat, kemudian yang kedua dengan jumlah 2.230 orang adalah jumlah yang belum tamat Sd/ sederajat, selanjutnya untuk masyarakat yang tidak sekolah adalah 721 orang, sebanyak 700 orang tamat SD/ sederajat, sebanyak 400 orang tamat SMA/ sederajat dan yang terakhir tidak tamat akademi sebanyak 25 orang, jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Desa Tamansari tergolong masih rendah.

Desa Tamansari memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.996 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.286 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.710 jadi dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Untuk tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tamansari dapat dilihat dari tabel diatas.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tamansari

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Buruh Harian	700
2	Penambang Belerang	250
3	Buruh Tani	230
4	Petani (pemilik lahan)	160
5	Pegawai swasta	65
6	Pedagang	60
7	Jasa Angkutan	50
8	PNS	40
9	Lain-lain	5.441
Jumlah		6.996

Sumber: Data Monografi Desa Tamansari 2015, Diolah

Mata pencaharian atau sumber penghasilan masyarakat Desa Tamansari sebagian besar adalah sebagai buruh harian yaitu sebanyak 700 orang, sedangkan untuk mata pencaharian lain adalah penambang belerang 250 orang. Banyak masyarakat yang memilih menjadi penambang karena menurut masyarakat menjadi

penambang tidak membutuhkan skill yang tinggi, buruh harian 230 orang, pegawai negeri 40 orang, pegawai swasta 65 orang, jasa, jasa angkutan 50 orang dan lain-lain. Sedangkan untuk petani atau pemilik lahan jumlahnya tidak terlalu banyak yaitu 160 orang, untuk tanaman yang sering ditanam di lahan persawahan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, serta cabai, selain itu karena letaknya yang berada dibawah kawah ijen perkebunan yang ada di Desa Tamansari ini sangat luas sehingga banyak pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian di perkebunan. Berikut adalah tabel matapencaharian masyarakat Desa Tamansari.

Potensi yang dimiliki Desa Tamansari sangatlah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) karena potensi desa tersebut dikelola dengan sangat baik demi kemakmuran masyarakat. Berikut adalah tabel PAD setelah berdirinya BUMDes Ijen Lestari :

Tabel 4.4 Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Tamansari Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2016	32.750.000
2	2017	10.250.000
3	2018	40.883.500

Sumber : PAD Desa Tamansari 2016 – 2018 diolah.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2016, jumlah PAD yang tercatat yaitu sebesar Rp 32.750.000,00. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 10.250.000,00 dan pada tahun 2018 jumlah total pendapatan desa mencapai titik yang paling tinggi karena pengelolaan sumber daya sudah bagus yaitu senilai Rp 40.883.500,00.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap tingkat perekonomian masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah BUMDes, pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4.2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah suatu usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang sebagian besarnya dimiliki oleh desa serta pengolahannya juga dilakukan oleh pemerintah desa (Permendagri No. 39 tahun 2010). Secara Nasional Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pasal 87, 88, 89 dan 90 merupakan pasal yang mengatur tentang BUMDes. BUMDes merupakan suatu unit usaha desa yang diorientasikan sebagai penyangga pelaku-pelaku ekonomi mikro yang ada dan berkembang di daerah pedesaan, hal ini merupakan strategi yang dipilih oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengembangkan penggiat ekonomi mikro melalui bantuan yang langsung dapat terhubung dengan BUMDes. Pembentukan BUMDes ini diharapkan dapat memperbaiki ekonomi desa, bahkan pemerintah memprioritaskan dan desa yang ada untuk modal usaha perbaikan perekonomian desa serta ditujukan untuk mengelola Sumber daya potensial yang ada desa (Widiyatmoko, 2016).

Desa Tamansari memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dalam pengembangannya Desa Tamansari berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lesatari yang berdiri sejak tahun 2015. Pengembangan *Smart* Kampung yang ada di Desa Tamansari merupakan program yang langsung berkaitan dengan kepentingan publik yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi terintegrasi berada dibawah penganwasan BUMDes Ijen Lestari.

4.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pada umumnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik seperti pelatihan keterampilan, peminjaman modal serta berbagi macam bantuan lain. Pemberdayaan masyarakat

merupakan cara tepat yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik (Adi, 2005:161-161).

BUMDes Ijen Lestari mampu memberikan kontribusi yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat melalui perencanaan dan pengelolaan BUMDes yang terstruktur dan berjangka panjang. Kontribusi tidak langsung dari BUMDes Ijen Lestari yang pertama adalah pelayanan berupa pelatihan (*training*) yang merupakan pengembangan skill atau kapasitas serta pelatihan batik untuk salah satu produk UMKM serta pelatihan homestay untuk standar pelayanan bagi tamu yang datang dan menginap, mulai dari cara memberisihkan kamar, fasilitas apa saja yang perlu dilengkapi hingga sopan santun di mana masing-masing pemilik memiliki karakter yang berbeda.

4.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Kemampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria disebut sebagai penyerapan tenaga kerja (Simanjuntak, 1998:92). Penyerapan kerja akan berpengaruh terhadap jumlah kesempatan kerja, ketika jumlah penyerapan kerja sama dengan jumlah kesempatan kerja maka tidak terjadi pengangguran namun, jika penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari kesempatan kerja maka akan menimbulkan adanya pengangguran. Penyerapan tenaga kerja berhubungan erat dengan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Permintaan tenaga kerja terjadi apabila tenaga kerja tersebut dirasa mampu untuk meningkatkan produksi baik barang maupun jasa yang akan dijual kepada konsumen nantinya. Permintaan konsumen akan suatu barang atau jasa yang diproduksi akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan (Simanjuntak, 2001:16).

BUMDes Ijen Lestari berkontribusi dalam hal lapangan pekerjaan, yaitu memberikan gaji secara langsung setiap bulan kepada masyarakat desa yang bekerja di BUMDes Ijen Lestari, dimana hal ini dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga serta mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Tamansari. Jumlah pekerja di BUMDes Ijen Lestari ini sebanyak 30 orang

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pengelolaan dan pengaruh BUMDes Ijen Lestari terhadap perekonomian masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lestari sebagai inovasi pelayanan publik untuk mendukung *community based tourism* di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam desa “Smart Kampung” yang mendukung BUMDes Ijen Lestari sebagai inovasi pelayanan publik yang menekankan kegiatan pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam perencanaannya BUMDes Ijen Lestari memiliki perencanaan jangka panjang dan berkelanjutan, dimana hal ini dapat dilihat dari program-program serta unit usaha yang ada di BUMDes Ijen Lestari. Dalam pengelolaannya BUMDes Ijen Lestari juga sangat baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi pada BUMDes Ijen Lestari dari tahun pertama pendirian sampai sekarang yang sudah berkembang pesat.

BUMDes Ijen Lestari ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dimana dalam masa perkembangannya banyak program-program yang dijalankan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam perencanaannya BUMDes Ijen Lestari memiliki perencanaan jangka panjang dan berkelanjutan, dimana hal ini dapat dilihat dari program-program serta unit usaha yang ada di BUMDes Ijen Lestari. Unit – unit usaha yang ada terdiri dari unit usaha *homestay* yang bekerjasama dengan masyarakat, unit usaha UMKM dan jasa angkutan atau kendaraan wisata. BUMDes dalam unit usaha yang fokus pada pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat adalah retribusi masuk desa, *homestay*, paket wisata, warung *osing*, wisata pinus dan sendang seruni. Dalam Mendukung Pariwisata berbasis masyarakat, BUMDes Ijen Lestari bersama dengan mitra terkait bekerja bersama di komunitas, sementara itu, pengembangan kapasitas lokal dilakukan dengan pembagunan dari ‘dalam’ yang juga memperhatikan aset komunitas yang terdiri

dari modal (capital) dalam upaya mengembangkan masyarakat, aset komunitas dikelola dengan baik, berfokus pada kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat.

2. Dalam memperkuat “smart kampung” dan kegiatan di masyarakat dengan potensi peningkatan kunjungan wisatawan, maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lestari, yang pada prakteknya merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes Ijen Lestari merupakan inovasi pelayanan publik yang didirikan untuk mendukung pariwisata berbasis masyarakat di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Hal ini karena BUMDes Ijen Lestari merupakan gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh komunitas atau Desa Tamansari. Pada akhirnya, kontribusi yang diberikan BUMDes bermanfaat positif bagi masyarakat dari aspek regulasi, inovasi, koordinasi, dan hubungan interaksi antara berbagai stakeholder sebagai media melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

BUMDes Ijen Lestari memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat terutama dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemberdayaan masyarakat ini dirancang dengan adanya pengembangan unit-unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes Ijen Lestari. Pengembangan ini juga dibarengi dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill atau kemampuan masyarakat desa agar lebih berkembang, selain itu pengelolaan BUMDes yang terstruktur dan baik juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah: peran pemerintah adalah membuat regulasi dalam mengatur keberadaan BUMDes sebagai inovasi pelayanan publik yang bersinergi dengan

desa, dunia usaha (investor) dan masyarakat. Pemerintah desa hendaknya menyusun peraturan desa (Perdes) yang kuat dan tegas untuk mengatur tata ruang dan wilayah desa agar tidak seluruh tanah di desa dapat dijual kepada pihak luar, hendaknya ada aturan untuk penguasaan lahan lebih ke arah Hak Guna Usaha dengan pengelolaan destinasi yang dikerjasamakan dengan BUMDes dan komunitas lokal.

2. Bagi BUMDes Ijen Lestari: peran BUMDes dalam unit usaha yang fokus pada pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat adalah retribusi masuk desa, *homestay*, paket wisata, warung osing, wisata pinus dan sendang seruni. Dari semua subunit usaha itu, hanya retribusi yang memberikan kontribusi paling tinggi dan bisa mempekerjakan 30 warga desa sebagai petugas BUMDes. Perlu ada upaya lainnya dari BUMDes untuk kemitraan usaha dan inovasi kegiatan, misalnya bekerjasama dalam pengelolaan Gandrung Terakota yang sementara ini dikembangkan oleh salah satu resort di wilayah Desa Tamansari. Selain itu, BUMDes juga perlu memperkuat unit IT dengan Website dan Sosial Media (fokus pada Instagram) yang kuat dengan kontennya sehingga kendala pemasaran dapat diatasi dengan pendekatan IT.
3. Bagi Komunitas: warga Desa Tamansari sebagian besar sudah sadar dengan wisata, namun demikian yang perlu ditingkatkan adalah profile wilayah mereka dengan keunggulan tertentu, misalnya keramahan senyum sapa salam dari komunitas ataupun pemilik usaha ekonomi lokal. Fasilitas destinasi juga perlu dijaga dari kebersihan yang dapat dilakukan swadaya oleh komunitas serta fasilitas dari *homestay* itu sendiri, misalnya air panas ataupun Wifi. Selain itu, bentuk- bentuk pelatihan dan pertemuan antar komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat perlu dilakukan secara rutin dan terjadwal agar terbangun komunikasi antar warga lebih dalam sebagai bentuk dari pembangunan dari dalam (*endogenous development*).
4. Bagi Dunia Usaha: peran dunia usaha dalam hal ini investor adalah bermitra dengan BUMDes atau komunitas lokal yang ada di Desa atau lokasi tempat

berusaha. Misalnya melalui kerjasama pengelolaan destinasi wisata ataupun mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan yang baik dan berkelanjutan. Selain itu dunia usaha juga dapat berperan dalam menyalurkan dana CSV ataupun CSR ke arah pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Widayat. 2002. *Riset Bisnis. Edisi 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Badan Pusat Statistika Banyuwangi. 2017. *Kecamatan Licin Dalam Angka 2017*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistika.
- Boediono. 2012. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).
- Gumilar, Agung Eko. 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Tenaga Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. X. Jakarta: Skripsi pada Sarjana UIN
- Handoko, Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ifi, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman
- Imam Yudhianto Soetopo. 2010. *Mengejewantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Juliandi, Azuar dan irfan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Kuncoro, Haryo. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 7 Nomor 1 : 45-54
- Kurniawan, Ade Eka. 2016. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupten Lingga Tahun 2015)", *Jurnal Ilmu Pengetahuan, Umroh*.
- LPPI dan Bank Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. E-book
- Martoyo , Susilo. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Nugroho, Dendhi Agung. 2015. "Evaluasi Penerapan Dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumahtangga Miskin (RTM) Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014-April 2015)". *JESP*, Vol. 7, No. 2 : 79-84, ISSN 2086-1575.
- Nugroho, Adi. 2005. *Analisis dan Peencanaan Sistem Informasi Dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika
- Nurcholis, Hanif. 2011. *"Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa"*. Penerbit Erlangga
- Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Sari, Andriani. 2017. Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Repository Institusi USU*.
- Setyobakti, Hudi. 2017. "Identification of Business Enterprises BUMDes Based on Social and Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Vilage District of Banyuwangi)" *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen (JEMA)* Vol. 14 No. 2 (2017)
- Sigit, Soehardi, 1999. *Pengantar Metodologi Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simanjuntak, Payaman J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman J. 1993. *Produktifitas Tenaga Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya, dalam Prisma*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- S., Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sutoro. E. (2018). *Republik Desa: Kemandirian, Kerakyatan dan Kemakmuran*. ICOGLASS. Universitas Sam Ratulangi.
- Suwarno & Doni Juni Priansa. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Syaiin, Subakti. 2008. *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Klinik Spesialis Bersari Medan Tahun 2007*. Medan: Skripsi pada Sarjana USU

Tiktik Partomo dan Abd Rachman Soejoedono. 2004. *Ekonomi Skala kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Widjaja. HAW., 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan pembubaran dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<https://inovasidesa.kemendesa.go.id/kembangkan-desa-wisata-tamansari-jadi-jujukan-studi-tiru/>Diunduh tgl 02-04-2019 jam 16.17 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2017/05/17/09100761/desa.tamansari.di.kaki.gunung.ijen.raih.wisata.award.> Diunduh tgl 02-04-2019 jam 18.18 WIB.

Lampiran A

KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI
TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
TAMANSARI KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI

A. Identitas Responden

3. Nama :
4. Alamat :
5. Jenis Kelamin :
6. Usia :
7. Pekerjaan :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Dimohon dengan hormat, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan tanggapan atau jawaban sesuai dengan realita di lapangan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.
2. Untuk perangkat desa dan komponen internal BUMDes dimohon untuk menjawab nomor 1-9.
3. Untuk masyarakat atau pelaku usaha mohon menjawab pertanyaan nomor 10-15.

C. Pertanyaan

1. Sejak kapan BUMDes Ijen Lestari didirikan ?

.....
.....
.....
.....

2. Apa yang bapak/ibu/saudara/saudari ketahui tentang BUMDes apabila dilihat dari segi ekonomi ?

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana perencanaan BUMDes di Desa Tamansari ?

.....
.....
.....
.....

4. Berapa anggaran BUMDes yang diterima di Desa Tamansari ?

.....
.....
.....
.....

5. Apakah anggaran BUMDes yang tersedia sudah fektifdigunakan di Desa Tamansari ?

.....
.....
.....
.....

6. Jenis usaha apa saja yang terdapat di Desa Tamansari setelah adanya BUMDes ?

.....
.....
.....
.....

7. Apa saja program BUMDes yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi di Desa Tamansari ?

.....
.....
.....
.....

8. Adakah campur tangan *stakeholder* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Tamansari ?

.....
.....
.....
.....

9. Sejauh ini, apa hambatan yang ada dalam menjalankan program-program BUMDes Ijen Lestari ?

.....
.....
.....
.....

10. Apakah dengan adanya BUMDes, masyarakat desa sangat terbantu ?

(a). Ya (b). Tidak

Bila ya, dari segi apa? Tolong berikan contohnya!

.....
.....
.....
.....

11. Bagaimana pengaruh yang terjadi terhadap perekonomian masyarakat setelah adanya BUMDes?

.....
.....
.....
.....

12. Adakah hambatan yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini ?

(a). Ya (b). Tidak

Bila ya, sebutkan hambatannya!

.....
.....
.....
.....

13. Apakah dengan adanya BUMDes pendapatan masyarakat desa meningkat ?

(a). Ya (b). Tidak

Bila ya, sebutkan berapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian Bapak/Ibu ?

.....
.....
.....
.....

14. Apakah dengan adanya BUMDes, tenaga kerja masyarakat desa terserap ?

(a). Ya (b). Tidak

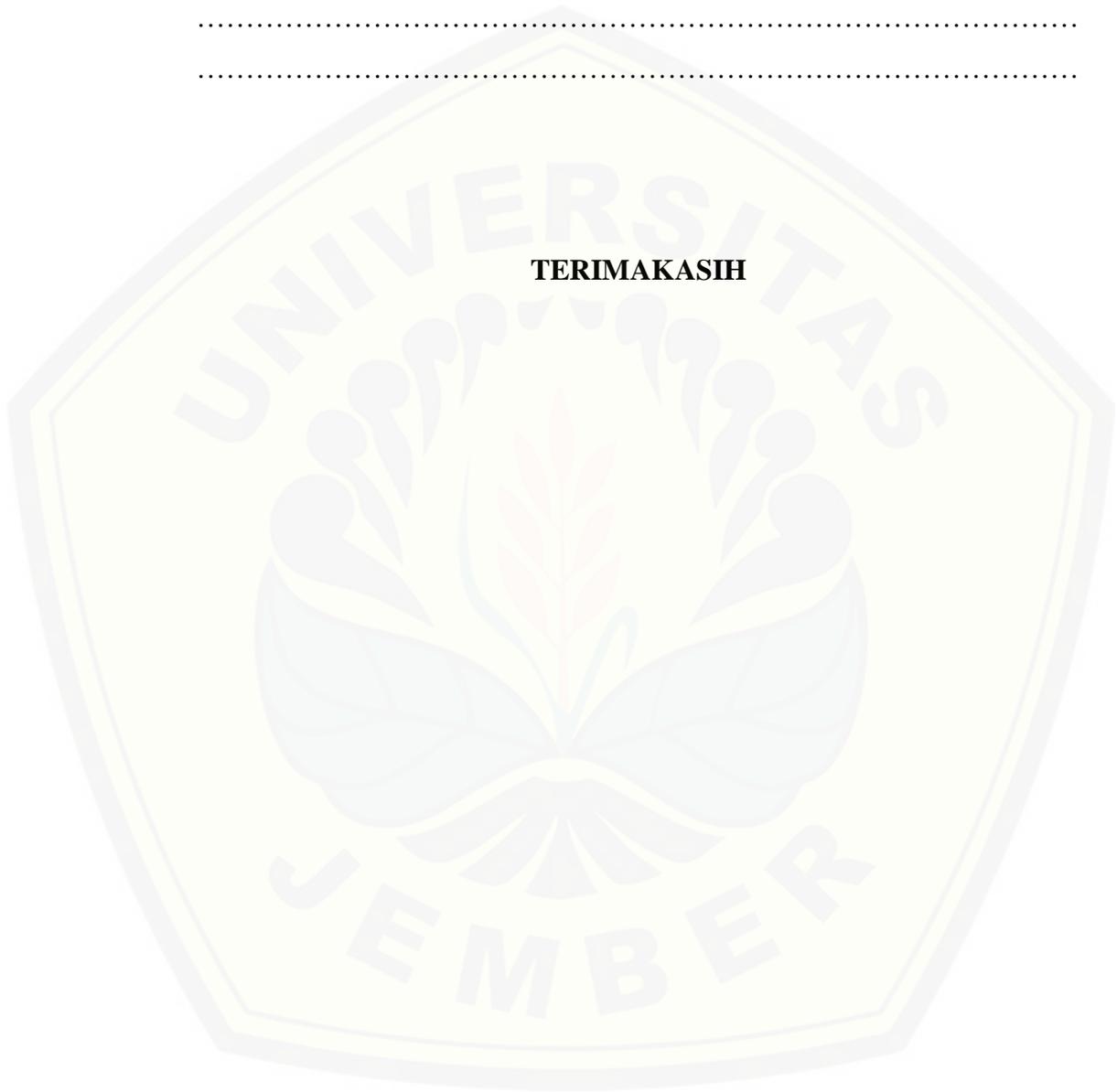
Bila ya, sebutkan berapa banyak yang terserap!

.....
.....
.....
.....

15. Apakah BUMDes juga memberdayakan masyarakat sebagai ujung tombak perekonomian ?

.....
.....
.....
.....

TERIMAKASIH



Lampiran B



Ketua BUMDes Ijen Lestari



Kepala Desa Tamansari



Sekretaris BUMDes Ijen Lestari



Homestay Kastini



Homestay Tamansari